

# **Analisis Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, wabah penyakit menular, seperti sindrom pernapasan akut parah (SARS) dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS), membawa kejutan negatif yang parah bagi ekonomi dunia. Sehingga, perdagangan dan perjalanan lintas batas telah memfasilitasi penyebaran patogen internasional. Pada akhir 2019, beberapa kasus COVID-19 telah diidentifikasi di China.

Saat pandemi menyebar, jumlah pengangguran akan meningkat dan semakin memperburuk situasi. Untuk mencapai kemakmuran dalam iklim pascapandemi, perlu untuk memastikan agen mereka dan mempertahankan praktik bisnis. Sebagian besar negara akan melihat peningkatan lapangan kerja hingga 2019 dan pengurangan jumlah itu pada 2020, yang mencerminkan efek epidemi saat ini. Malaysia, Pakistan, dan Indonesia adalah beberapa negara yang memiliki tingkat pengangguran yang lebih besar daripada negara-negara lain yang telah menarik diri (L. Shi et al., 2022). Pengangguran di wilayah yang didominasi Asia diperkirakan akan meningkat menjadi 14% pada tahun 2020. Menurut para ahli, epidemi Covid akan terus menjadi ancaman bagi kehidupan banyak orang, mungkin menyebabkan penyumbatan besar dalam ekonomi global bersatu.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa, meningkat 32,56 juta jiwa dibandingkan Sensus Penduduk 2010. Hasil proyeksi penduduk

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2035, total penduduk Indonesia akan mencapai lebih dari 300 juta jiwa dimana penduduk Indonesia lebih didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu antara 15-64 tahun. Hal ini membuat Indonesia memasuki era bonus demografi dimana usia produktif dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pembangunan atau menjadi beban perekonomian seperti meningkatnya pengangguran.

Masalah pengangguran meningkat selama pandemi Covid-19. Masalah pengangguran meningkat selama pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh International Labor Organization (ILO). Menurut ILO (2021), Covid-19 telah memberikan dampak negatif bagi dunia kerja berupa pengurangan jam kerja dan kehilangan pekerjaan. Dampak Covid-19 terhadap dunia kerja lebih tinggi dibandingkan krisis keuangan 2009. ILO menunjukkan bahwa hampir 9 persen jam kerja global hilang tahun lalu, yang pada gilirannya setara dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu. Pandemi Covid-19 menyebabkan kerugian besar dalam pendapatan tenaga kerja global, yang kira-kira sama dengan 4,4 persen dari produk domestik bruto global.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tetap menjadi masalah penting setiap negara terlepas dari tingkat perkembangan ekonomi mereka. Negara-negara menargetkan kebijakan ekonomi mereka untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Meskipun, ada banyak literatur tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, tidak ada konsensus tentang arah dan intensitas hubungan. Perbedaan dalam struktur ekonomi negara juga mencerminkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran untuk sebagian besar.

Pengangguran merupakan masalah penting bagi negara berkembang, yang memiliki peran langsung dan utama dalam perekonomian suatu negara. Pengangguran merupakan sebuah masalah dimana individu yang mencari pekerjaan dengan bersedia bekerja pada tingkat upah saat ini dan berusaha dengan cara ini tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Pengangguran menjadi sebuah isu untuk banyak negara dengan revolusi industri dan telah

menjadi masalah penting terutama di negara-negara berkembang hingga tahun 1980-an. Sejak itu, masalah pengangguran mulai ditemui di negara-negara maju. Pengangguran pun menjadi salah satu masalah ekonomi makro terpenting yang ingin dipecahkan oleh semua negara di dunia dan telah menjadi bahan perdebatan terus-menerus karena pengangguran memiliki efek sosial serta efek ekonomi. Dalam hal ini, negara-negara telah melakukan upaya untuk memahami variabel mana yang meningkatkan pengangguran dan telah mencoba mengembangkan kebijakan solusi untuk pengangguran.

Pengangguran dianggap sebagai masalah serius yang dihadapi sebagian besar negara maju dan berkembang dan mengakibatkan masalah sosial ekonomi. Pemerintah telah memberikan perhatian besar untuk menciptakan peluang kerja dan mengoperasikan kembali unit-unit yang menganggur untuk menghilangkan fenomena ini. Ada beberapa alasan di balik fenomena ini, terutama di negara-negara berkembang, hal ini disebabkan oleh kekurangan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan populasi tambahan, ketidakmampuan untuk memobilisasi tabungan domestik dalam membiayai investasi yang diinginkan, penurunan aktivitas ekonomi karena resesi, perubahan teknologi, perubahan permintaan konsumen, pekerjaan yang memenuhi syarat, yang tidak sepadan dengan perubahan pasar tenaga kerja (Khrais & Wadi, 2016). Pengangguran umumnya datang sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Hal ini adalah pandangan yang diterima secara luas bahwa tingkat pertumbuhan GDP secara langsung mempengaruhi tingkat pengangguran. Jika naik, maka lapangan kerja akan naik dan tingkat pengangguran akan turun.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tetap menjadi masalah penting setiap negara terlepas dari tingkat perkembangan ekonomi mereka. Negara-negara menargetkan kebijakan ekonomi mereka untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal sebagai solusi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca pandemi Covid-19?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari esai ini adalah untuk melihat besarnya tingkat pengangguran dan besarnya penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan mengetahui pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal sebagai solusi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca pandemi Covid-19.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Relevan**

##### **2.1.1 Pengangguran**

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa dalam indikator ketenagakerjaan, yang disebut pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran biasanya dianggap sebagai kondisi yang tidak disesuaikan daripada penawaran dan permintaan sementara pekerja. Pengangguran dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran (Puspadjuita, 2017). Pertama, sisi permintaan pengangguran disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat, tidak membutuhkan sejumlah besar pekerja. Kedua, sisi penawaran adalah hasil dari ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja.

Biaya manusia dari pengangguran saja akan membenarkan menjadikan tingkat pengangguran yang rendah sebagai prioritas kebijakan publik yang penting. Tetapi pengangguran juga termasuk biaya ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika jutaan pekerja yang menganggur tetapi bersedia tidak dapat menemukan pekerjaan, sumber daya ekonomi tidak akan digunakan. Ekonomi dengan pengangguran tinggi seperti perusahaan yang beroperasi dengan pabrik fungsional tetapi tidak terpakai. Biaya peluang pengangguran adalah output yang bisa dihasilkan oleh pekerja yang menganggur.

Tingkat pengangguran adalah indikator yang dapat diandalkan dari lingkungan pasar kerja. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap pengembalian saham bervariasi tergantung pada perekonomian negara (L. Shi et al., 2022). Sehingga disimpulkan bahwa tingkat pengangguran

secara akurat membantu konsumen menghindari risiko pasar dari perubahan mengejutkan dalam kondisi proyek dan perawatan ekonomi.

Pengangguran, yang diukur dengan tingkat pengangguran, adalah persentase orang dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Ketika orang kekurangan pekerjaan, ekonomi menyia-nyiakan sumber daya kerja yang berharga, dan hasilnya adalah barang dan jasa yang dihasilkan lebih rendah. Namun, pengangguran lebih dari sekadar statistik — ini mewakili mata pencaharian masyarakat. Sementara pengangguran yang diukur tidak mungkin nol, tingkat pengangguran yang diukur sebesar 5% atau kurang dianggap rendah (baik).

### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Hal ini biasanya diukur dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP), yang merupakan nilai total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perbatasan suatu negara dalam periode waktu tertentu (Priambodo, 2021).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perluasan kapasitas produktif ekonomi secara keseluruhan, yang mengarah ke tingkat output yang lebih tinggi dan berpotensi meningkatkan standar hidup bagi penduduk. Ini biasanya melibatkan peningkatan faktor-faktor seperti produktivitas tenaga kerja, investasi modal, kemajuan teknologi, dan peningkatan efisiensi alokasi sumber daya. Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai tujuan utama bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, karena dapat menyebabkan berbagai manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan pajak, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan standar hidup. Namun, penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin distribusi kekayaan yang adil atau peningkatan kesejahteraan sosial. Masalah distribusi dan keberlanjutan pertumbuhan juga merupakan

pertimbangan penting dalam mengevaluasi kesehatan dan dampak ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya menentukan standar hidup yang berlaku di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan persentase perubahan produk domestik bruto riil (d disesuaikan dengan inflasi). Tingkat pertumbuhan lebih dari 3% dianggap baik.

## **2.2 Konsep Pemikiran**

Pandemi COVID-19 telah memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, dan mengakibatkan tingkat pengangguran yang meningkat akibat banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terpaksa mengurangi biaya operasional, serta penurunan pertumbuhan ekonomi akibat kegiatan ekonomi negara yang terganggu akibat pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, dan pembatasan aktivitas sosial telah menyebabkan penurunan tajam dalam produksi dan permintaan. Pemerintah negara Indonesia butuh untuk menerapkan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong kembali perekonomian negara dan menekan tingkat pengangguran di Indonesia.

## **2.3 Variabel dan Indikator**

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu kondisi dimana terjadinya perkembangan GDP (Gross Domestic Product) yang mencerminkan adanya pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat, yang dihitung setiap tahunnya dalam persen.

Pengangguran diukur melalui tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah individu yang menganggur dan jumlah angkatan kerja, yang dihitung persentasenya pada setiap tahunnya.

## **2.4 Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shi et al., (2022) mengenai prediksi tingkat pengangguran sebagai akibat dari pandemi Covid-19, dijelaskan bahwa pengangguran akan meningkat secara signifikan di negara-negara berkembang di tahun-tahun mendatang, dan ini akan berdampak sangat parah pada ekonomi kawasan yang belum berkembang, seperti negara-negara Asia meliputi Indonesia, India, Malaysia, dan sebagainya.

Penelitian analisis deskriptif sebelumnya yang dilakukan oleh Rokhim et al., (2023), menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran untuk pria cenderung lebih tinggi daripada wanita setiap tahun. Tingkat pengangguran di perkotaan cenderung hampir dua kali lebih tinggi daripada tingkat pengangguran di pedesaan. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat upah selama pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Khrais dan Wadi, 2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dampak yang dipertimbangkan oleh GDP terhadap pengangguran di semua negara yang terlibat. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara GDP dengan pengangguran pada negara yang ditinjau dari tenaga kerja di banyak negara Asia. Ada kemungkinan atau faktor lain yang memengaruhi pengangguran selain GDP.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Paramita (2021) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran pajak kurang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatasi pengangguran jika dibandingkan dengan kebijakan moneter yaitu dengan suku bunga dan jumlah uang beredar yang lebih besar. Pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh positif yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun signifikan untuk jangka panjang. Sedangkan di sisi lain, efeknya negatif untuk jangka pendek.

## **BAB III**

### **PENDEKATAN**

#### **3.1 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka atau *library research*. Studi pustaka (literature study) adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, menganalisis, dan menyintesis literatur yang relevan tentang topik atau bidang penelitian tertentu. Studi pustaka melibatkan pembacaan kritis dan pemahaman terhadap teori, penelitian, temuan empiris, dan sumber informasi lainnya yang telah dipublikasikan sebelumnya (Fadli, 2021).

Tujuan dari studi pustaka adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, mengevaluasi dan menyusun ulang temuan-temuan yang ada, serta merumuskan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian selanjutnya. Metode studi pustaka dapat digunakan sebagai pendekatan penelitian mandiri atau sebagai langkah awal dalam proses penelitian yang lebih luas.

Dalam melakukan analisis, dilakukan pengumpulan data dengan cara mencari data dari sumber yaitu jurnal dan artikel ilmiah. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

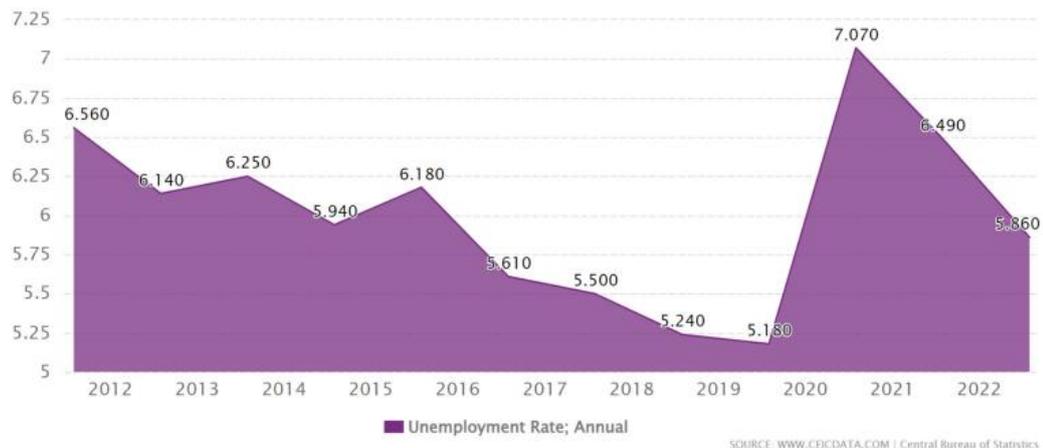
#### **4.1 Tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca pandemi Covid-19**

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, sehingga mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dan cepat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Masalah ekonomi adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah pengangguran karena berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat (L. P. Shi & Wang, 2022)

Pandemi covid-19 melemahkan pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Terjadi penurunan sebesar 2,41% sebagai dampak dari pandemi Covid-19, yang mengakibatkan kenaikan tingkat defisit anggaran negara sebesar 6,27% dari produk domestik bruto (Indayani & Hartono, 2020).

Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada ekonomi global, yang menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran di banyak negara. Pandemi menyebabkan gangguan yang meluas pada bisnis, rantai pasokan, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang mengakibatkan PHK, cuti, dan penutupan bisnis (Agustina et al., 2023)

Gambar 1. Tingkat Pengangguran di Indonesia dari tahun 2011 - 2021



Sumber: Badan Statistik Pusat (BPS)

Secara empiris, tingkat pengangguran tertinggi adalah 7,07% ketika pandemi COVID-19 pertama kali muncul pada tahun 2020. Dibandingkan dengan 2019, ini meningkat sebesar 1,84% ke puncaknya. Berdasarkan data, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2015 hingga 2019. Pada Gambar 1, data menunjukkan bahwa pengangguran dari tahun 2011 hingga 2019 cenderung datar atau tidak mengalami kenaikan angka yang berlebihan, namun pada tahun 2020 dan 2021, terjadi peningkatan pengangguran yang sangat tinggi; ini karena pandemi COVID-19.

Urgensi pengentasan pengangguran didasarkan pada pertimbangan dan tren mengenai kesejahteraan masyarakat (Agustina et al., 2023). Oleh karena itu, banyak dibutuhkan lapangan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga jumlah pengangguran menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Meminimalkan tingkat pengangguran sangat penting. Secara tidak langsung, masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kesejahteraan dapat terasa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia berbasis peran masyarakat, yang dianggap perlu agar masalah pengangguran dapat diminimalisir dan diatasi.

Laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan berdampak positif pada berbagai aspek pembangunan ekonomi, termasuk meningkatnya peluang pengembangan bagi perusahaan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Segun & Samson, 2015). Indeks Pembangunan Manusia, atau modal manusia, harus diprioritaskan dan diposisikan secara strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi saat ini dan masa depan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh PDRB di suatu daerah diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, dan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) dapat meningkatkan kapasitas produksi (Valeriani et al., 2019). Dapat diindikasikan bahwa penurunan tingkat PDRB dapat mempengaruhi tingginya jumlah pengangguran (Oluwatobi dan Ogunrinola, 2011). Tingkat pengangguran di Indonesia sering berubah. Perubahan tingkat pengangguran di Indonesia terjadi karena meningkatnya jumlah angkatan kerja namun tidak dibarengi dengan peningkatan investasi (Astrid dan Soekapdjo, 2020).

Hasil penelitian (Rokhim, Novianti dan Anggraeni, 2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar satu persen maka akan menyebabkan penurunan pengangguran di Indonesia sebesar 0,04 % dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Hal ini sejalan dengan penjelasan (Puspajuita, 2017) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi akan mendorong penggunaan faktor-faktor produksi, salah satunya tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran (Hadi Setiowati & Yudo Nugroho, 2021)

Di sisi lain, adapun pendapat tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustina et al., 2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Pengaruh pertumbuhan output (PDB) terhadap lapangan kerja relatif dapat diabaikan dan lemah. Sementara ekonomi Indonesia masih tumbuh, kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja tetap lemah dan di bawah rata-

rata. Kondisi ini masih menunjukkan meningkatnya pengangguran di wilayah di mana lapangan kerja tidak tumbuh seiring pertumbuhan ekonomi (Ziberi dan Avdiu, 2020). Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Levine, 2013), yang menyatakan bahwa pertumbuhan PDB tidak cukup untuk melebihi tingkat pertumbuhan gabungan dalam angkatan kerja dan produktivitas sehingga pengurangan pengangguran dapat dijamin dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan perlunya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran di suatu daerah dapat ditekan.

#### **4.2 Strategi Kebijakan Fiskal dalam Menghadapi Keadaan Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19**

Untuk mengatasi pengangguran di Indonesia, pemerintah dapat menerapkan strategi kebijakan fiskal. Sehubungan dengan belanja modal untuk pengembangan modal manusia, pendekatan baru, mungkin dapat diterapkan didasarkan pada kemitraan antara sektor swasta dan publik ekonomi harus diberlakukan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk pencairan dan pemanfaatan dana untuk proyek-proyek modal dalam pengembangan ekonomi (Ziberi dan Avdiu, 2020).

Pemerintah Indonesia merancang berbagai kebijakan fiskal untuk mendorong perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19. Pemerintah negara Indonesia menerapkan *refocusing* anggaran untuk mendahulukan atau menjadikan segala pengeluaran terkait dengan pandemi covid-19 sebagai prioritas pertama negara Indonesia (Mirani et al., 2021). Diketahui bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menunda terlebih dahulu pengeluaran yang tidak berhubungan dengan permasalahan covid-19, atau tidak relevan dengan kondisi negara saat ini (Kemenkeu.go.id, 2020). Adapun pemerintah menerapkan strategi penghematan belanja negara, yaitu dengan tidak membelanjakan hal yang tidak berhubungan dengan pandemi, seperti honorarium, biaya rapat, belanja non-operasional, dan

keperluan belanja lain yang tidak diperlukan negara saat ini. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia pun melakukan negosiasi ulang terkait proyek pembangunan negara untuk menghemat anggaran belanja.

Strategi kebijakan fiskal ekspansif hanya mampu mengurangi pengangguran dalam jangka yang sangat pendek, yang berpotensi menyebabkan inflasi. Studi yang dilakukan oleh Sanjaya (2020) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif efektif dalam meningkatkan tingkat output ke tingkat potensial hanya dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang ekspansi fiskal mengarah ke penurunan keadaan perekonomian menjadi lebih buruk (Sumando, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas meningkatkan konsumsi pemerintah dalam satu tahun dapat membantu merangsang ekonomi tetapi pemerintah membutuhkan lebih dari itu untuk mencapai stabilisasi dalam jangka panjang. Fungsi respons impuls menunjukkan bahwa kebijakan moneter sangat sensitif terhadap guncangan inflasi dan merespons dengan cara kontra-siklus.

Di sisi lain, kebijakan fiskal menunjukkan gerakan pro-siklus terhadap inflasi dan pengangguran, yang mungkin menjelaskan mengapa kebijakan moneter merespons dengan kuat daripada yang seharusnya (Subagiyo et al., 2021). Kebijakan fiskal merupakan penentu penting perkembangan ekonomi dan, dengan demikian, mempengaruhi kebijakan moneter melalui beberapa saluran. Beberapa langkah fiskal seperti meningkatkan konsumsi pemerintah memiliki efek langsung pada inflasi. Langkah-langkah fiskal lainnya memiliki efek tidak langsung pada inflasi melalui dampaknya terhadap permintaan agregat. Selanjutnya, kebijakan fiskal mempengaruhi variabel ekonomi lain yang penting dalam transmisi kebijakan moneter, terutama suku bunga, penyebaran suku bunga dan nilai tukar (Susila Adiyanta, 2020) Dalam kasus ekstrim yang dikenal sebagai dominasi fiskal, kebijakan moneter bahkan mungkin menjadi bawahan dari kebijakan fiskal. Salah satu implikasi kebijakan dari temuan tersebut adalah perlunya kesinambungan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal. Koordinasi kelembagaan ini dapat

menghindari dominasi fiskal dan membantu memastikan stabilitas ekonomi suatu negara.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan tingkat pengangguran mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi negara menjadi terhambat, sebab terjadi gangguan yang meluas dari segi bisnis, rantai pasokan, PHK dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi tingkat pengangguran yang berdampak pada ekonomi di Indonesia, pemerintah dapat menerapkan strategi kebijakan fiskal. Sehubungan dengan belanja modal untuk pengembangan modal manusia, pendekatan baru, mungkin dapat diterapkan didasarkan pada kemitraan antara sektor swasta dan publik ekonomi harus diberlakukan. Pemerintah Indonesia merancang berbagai kebijakan fiskal untuk mendorong perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19. Pemerintah negara Indonesia menerapkan *refocusing* anggaran untuk mendahulukan atau menjadikan segala pengeluaran terkait dengan pandemi covid-19 sebagai prioritas pertama negara Indonesia, menerapkan strategi penghematan belanja negara, yaitu dengan tidak membelanjakan hal yang tidak berhubungan dengan pandemi, seperti honorarium, biaya rapat, belanja non-operasional, dan keperluan belanja lain yang tidak diperlukan negara saat ini. Perlu untuk diingat bahwa kebijakan fiskal harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan kebijakan moneter. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter penting untuk mencapai efek yang optimal dalam mengatasi tingkat pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M., Astuti, H., Susilo, J. H., Agustina, M., Astuti, H., & Susilo, J. H. (2023). Unemployment in Indonesia: An analysis of economic determinants. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1), 69–82. <https://doi.org/10.15408/sjie>
- Astrid, E., & Soekapdjo, S. (2020). Pengaruh inflasi, jumlah penduduk, ipm, pma, dan pmdn terhadap tingkat pengangguran di indonesia. *FORUM EKONOMI*, 22(2), 319–325. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Hadi Setiowati, T. A., & Yudo Nugroho, R. Y. (2021). Pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap pengangguran di indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 433–442. <https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.205>
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2). <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>
- Khrais, I., & Wadi, M. (2016). Economic growth and unemployment relationship: an empirical study for mena countries. *International Journal of Managerial Studies and Research*, 4(12). <https://doi.org/10.20431/2349-0349.0412003>
- Levine, L. (2013). *CRS report for congress economic growth and the unemployment rate*. [www.crs.gov](http://www.crs.gov)
- Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., Maulana, A., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Jakarta, ". (2021). The government's fiscal policy strategy to improve the economy of indonesia in the covid-19 pandemic period. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 193–204. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Oluwatobi, S. O., & Ogunrinola, Oluranti. I. (2011). Government expenditure on human capital development: implications for economic growth in nigeria. *Journal of Sustainable Development*, 4(3). <https://doi.org/10.5539/jsd.v4n3p72>
- Paramita, R. (2021). Effectiveness of fiscal and monetary policies in overcoming inflation in indonesia 1984-2019, *Period Rastri Paramita*. 6(1).
- Priambodo, A. (2021). The impact of unemployment and poverty on economic growth and the human development index (HDI). *Perwira International Journal of Economics & Business*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.54199/pijeb.v1i1.43>
- Puspajuita, E. A. R. (2017). Factors that Influence the Rate of Unemployment in Indonesia. *International Journal of Economics and Finance*, 10(1), 140. <https://doi.org/10.5539/ijef.v10n1p140>

- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Rokhim, F., Novianti, T., & Anggraeni, L. (2023). Factors Influencing Unemployment in Indonesia. In *JSRET (Journal of Scientific* (Vol. 2, Issue 1).
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan penganggaran daerah dimasa pandemi covid-19 (study kasus pada pemerintah daerah provinsi banten). *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273–290.
- Shi, L., Khan, Y. A., & Tian, M. W. (2022). COVID-19 pandemic and unemployment rate prediction for developing countries of Asia: A hybrid approach. *PLoS ONE*, 17(12 December). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275422>
- Shi, L. P., & Wang, S. (2022). Demand-side consequences of unemployment and horizontal skill mismatches across national contexts: An employer-based factorial survey experiment. *Social Science Research*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2021.102668>
- Subagiyo, A., Islah, K., Kumala, R., & Harjo, D. (2021). Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi melalui Kebijakan Pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(2), 189–194. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Sumando, E. (2014). Fiscal and monetary policy interaction in indonesia: a varanalysis from 2000 to 2013. *Jurnal BPPK*, 7(1), 183–190.
- Susila Adiyanta, F. C. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 2621–2781. <https://katadata.co.id/berita/2019/05/23/menko-darmin-semua-menderita-akibat-perang-dagang>
- Valeriani, D., Dalimunthe, D., Wulandari, A., & Ashar, M. (2019). Vector auto regression analysis between export, economic growth, and job opportunity in bangkabelitung islands province. *Applied Economics Letters*, 7(4), 393–396. <https://doi.org/10.1080/1350485042000228268>
- Ziberi, B., & Avdiu, M. (2020). Econometric Analysis to Examine the Relationship between Unemployment and Macroeconomics Aggregates. Evidence from Kosovo. *Academic Journal of Economic Studies*, 6(2), 33–41.